

## MANAJEMEN PEMBANGUNAN DI DESA PAKKASALO KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE

Anggryani A<sup>1\*</sup>, Abdul Kadir Adys<sup>1</sup>, Nasrulhaq<sup>2</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the process of planning, implementation, and supervision in village development in Pakkasalo Village, Dua Boccoe District, Bone Regency. This study used qualitative research. Data collection techniques used interviews, observation and documentation studies. Research informants amounted to 8 people. The results showed that the Pakkasalo village government had implemented the planning process in the context of village development management through the musrembang. Implementation was carried out in the development process by involving community workers in general without paying attention to the expertise possessed by each development implementing worker in Pakkasalo Village. The process of supervising the development had been going quite well, although there were still uncompleted in the process. The development that had been carried out by the government, it had provided changes for the better and the community participates from planning, implementation to supervision of village development.*

**Keywords:** management, village development

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan desa di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah desa takkasalo telah melaksanakan proses perencanaan dalam rangka manajemen pembangunan desa lewat musrembang. Pelaksanaan dijalankan dalam proses pembangunan dengan melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki dari setiap pekerja pelaksana pembangunan di Desa Pakkasalo. Proses pengawasan terhadap pembangunan telah berjalan cukup baik meskipun dalam pengerjaan masih ada beberapa yang belum tersentuh. Pembangunan yang telah dijalankan oleh pihak pemerintah telah memberikan perubahan yang lebih baik dan masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan pembangunan desa.

**Kata kunci:** manajemen, pembangunan desa

---

\* anggryani@gmail.com

## PENDAHULUAN

Desa memiliki peranan yang penting dalam hal pembangunan nasional. Salah satu poin dari susunan cara pembangunan nasional yaitu pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi semua aspek masyarakat desa. Pemerintah menyadari perihal pentingnya pembangunan ditingkat desa. Berbagai bentuk program untuk menggerakkan adanya percepatan pembangunan wilayah atau daerah pedesaan telah dilaksanakan oleh pemerintah namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan desa perlu dilakukan secara terencana dengan efektif dan efisien serta harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan menjadi kunci dalam mewujudkan kesuksesan untuk melaksanakan pembangunan di desa. Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyampaikan kepada Pemerintah Desa dalam menata perencanaan pembangunan desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Manajemen pembangunan merupakan suatu upaya untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jauh lebih baik dari 2 keadaan sebelumnya yakni dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja.

Manajemen pembangunan wilayah tidak bisa terlepas dari perencanaan penggunaan ruang wilayah, kalau perencanaan ingin dibuat terpadu. Menurut Riyadi & Bratakusumah (2014:7), perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan- keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan / aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Dengan demikian, definisi perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang

diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negtifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah Desa (Wasistiono, 2006:5). Meskipun demikian masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakseimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan dan sebagainya. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun desa memiliki dua sumberdaya penting, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, tetapi Pemerintah bersama masyarakat desa tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatannya nyata guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Desa tidak lagi mampu menjadi tempat hidup dan penghidupan yang layak bagi warganya. Indikatornya adalah semakin banyaknya warga desa yang bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Salah satu penyebab terjadinya kondisi yang

demikian itu adalah ketidakmampuan pemerintah dan masyarakat desa memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perencanaan pembangunan yang disusun secara komprehensif, sistematis dan program serta kegiatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pembangunan memegang peranan yang sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan desa karena dengan perencanaan yang baik dan tepat diharapkan akan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Pakkasalo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone yang melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang desa. Penyusunan manajemen pembangunan desa tidak terlepas dari prinsip dasar bahwa manajemen memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan desa mencapai tujuan. Perencanaan pembangunan Puskesmas

rawat inap sebelumnya akan dilaksanakan di desa Uloe dan dibatalkan karena masalah sengketa ahli waris tanah oleh masyarakat sekitar kemudian perencanaan tersebut di pindahkan ke desa Pakkasalo karena desa ini memiliki lahan yang telah dihibahkan dari masyarakat setempat untuk mendirikan Puskesmas Rawat Inap selain itu lokasi desa Pakkasalo adalah desa yang strategis pada kecamatan Dua Boccoe karena terletak pada pertengahan kecamatan dibandingkan dengan desa lainnya.

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan. Namun perlu disadari pula bahwa dalam menjalankan perannya sebagai elemen penting dalam pembangunan desa, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pakkasalo. Meskipun telah dihasilkan perencanaan yang baik, tetapi perlu juga dipertimbangkan dan diperhatikan faktor-faktor geografis, klimatologis,

potensi sumber daya alam, ketersediaan anggaran, sumber daya manusia dan lain-lain. Antara perencanaan dan faktor-faktor yang telah disebutkan merupakan suatu kolaborasi yang saling mempengaruhi dalam implementasi atau pelaksanaan pembangunan desa.

Keberhasilan Pemerintah Desa Pakkasalo dalam melaksanakan pembangunan desa, dapat dilihat dari 5 indikator tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan masyarakat. Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dalam hal ini sangat menarik untuk diketahui lebih rinci dan secara mendalam seluruh proses perencanaan pembangunan di Desa Pakkasalo. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Pembangunan di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan desa di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Menurut Handoko, 2012:8).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system social, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander:1994).

Tujuan pembangunan ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara menyeluruh melalui pelayanan Pendidikan formal dan informal didukung oleh pelayanan Kesehatan dan perumahan untuk menjadikan manusia yang cerdas, sehat dan peduli lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian kualitatif. Objek penelitian adalah Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara maupun observasi oleh informan / narasumber pada lokasi/ objek penelitian. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak

langsung mengenai dengan objek penelitian. Data sekunder adalah data pendukung yang bersumber dari literature maupun data yang terkait dengan lokasi/objek penelitian. Informan penelitian berjumlah 8 orang yang terdiri dari kepala Desa Pakkasalo, sekretaris desa, KAUR perencanaan pemerintahan desa, KAUR keuangan pemerintahan desa, Ketua BPD dan 3 masyarakat desa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti menggunakan 3 teknik pengabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan**

Perencanaan merupakan titik awal dimulainya proses dari politik pembangunan. Didalam memahami perencanaan, sering kali diartikan sebagai mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai factor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, dan menetapkan tujuan. Perencanaan merupakan suatu proses yang

berkesinambungan yang mencakup keputusan- keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya guna mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Manghayu, 2018). Pembangunan merupakan rangkaian usaha guna mewujudkan pertumbuhan dan juga perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh sebuah negara bangsa menuju modernitas. Sama halnya yang dijalankan oleh pemerintah Desa Pakkasalo dalam melaksanakan pembangunan yang pada hakikatnya harus diprioritaskan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat (Pardede, Tafonao, & Buulolo, 2021). Pemerintah Desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) (Hurriyaturohman, Indupurnahayu, & Septianingsih, 2021).

Perencanaan dalam Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan

kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat Desa dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak lainnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 dimana dalam penyusunan rencana pembangunan di Desa Takkasalo, maka aparatur pemerintahan desa juga melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa. Pada tahap perencanaan meliputi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penyusunan Rencana Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa, penyampaian Raperdes dan pencairan APBDesa. Adapun dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap beberapa dokumen diketahui pada tahap perencanaan dapat dilihat berita acara yang ada di dokumen rencana kerja tahun 2016, dimana dalam pelaksanaan Musrenbang diikuti oleh Perangkat desa, BPD, Kadus, Tokoh Adat, dan

juga Tokoh Masyarakat dan juga Tokoh Agama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan asas transparansi pada tahap perencanaan dalam pembangunan desa, masyarakat turut terlibat mengikuti musyawarah mengenai perencanaan pembangunan Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone, sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana apa saja yang dilaksanakan pada Desa Pakkasalo. Dipahami bahwa rencana pembangunan desa harus dilaksanakan melalui pemberdayaan, partisipasi dan advokasi masyarakat yang terbuka, akuntabel, selektif dan efektif, akurat, berkelanjutan dan melalui proses berulang kali untuk hasil yang efektif. Partisipasi komunitas, perencanaan pembangunan diharapkan mampu agar lebih fokus. Artinya, rencana atau program pembangunan diselenggarakan sesuai dengan dibutuhkan oleh masyarakat berarti dalam rencana disusun sesuai dengan prioritas atau diberi peringkat berdasarkan tingkat kepentingan mana yang diutamakan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegagalan perencanaan pembangunan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan perencanaan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena

terkait dengan partisipasi masyarakat itu sendiri. Konsep perencanaan pembangunan desa belum dapat melibatkan seluruh masyarakat setempat karena konsep kebijakan masih bersifat *top-down*. Sehingga program pembangunan desa tidak dapat mengakomodir kepedulian desa berupa potensi desa dan keunikan masing-masing desa yang berbeda-beda. Selain itu, pelaksanaan kebijakan pembangunan desa masih bersifat parsial. Setiap program yang berasal dari instansi yang berbeda tidak bersinergi dengan program lainnya. Sehingga sering terjadi duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan di desa yang sama.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana pengelola/manajemen yang berasal dari unsur-unsur perangkat desa yang

ditunjuk oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Pakkasalo. Kepala Desa mensosialisasikan program-program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan oleh Desa dan memberitahukan besaran biaya untuk tahun Anggaran berjalan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan Desa. Dalam pelaksanaan program pengelolaan ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pengelola kepada seluruh masyarakat.

Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari keberhasilan perangkat desa dalam meningkatkan berbagai sumber daya yang ada di wilayahnya, dan keberhasilan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan yang dilaksanakan. Terlepas dari berhasil tidaknya pembangunan desa, harus diperhatikan bahwa pembangunan harus dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa agar aparat tidak

hanya mengejar tujuan untuk kepentingan tertentu saja, tetapi dapat memahami aspirasi yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan menunjukkan bahwa partisipasi dalam manajemen adalah hal yang penting guna menentukan keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam hal ini partisipasi dalam pembangunan masyarakat Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sudah berjalan dengan efektif.

Partisipasi tersebut diwujudkan pada setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan di desa, seluruh masyarakat hendaknya dilibatkan dalam setiap agenda pembangunan yang dijalankan di desanya tanpa kecuali, pembangunan yang dimaksud disini mencakup pembangunan fisik desa tersebut. Pembangunan fisik disini berupa pembangunan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang ada di desa. Partisipasi masyarakat Desa Takkasalo dalam pelaksanaan pembangunan di desanya diwujudkan dalam bentuk swadaya tenaga dan swadaya uang.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik di Desa Takkasalo selama ini sudah berjalan baik dengan pembangunan di Desa Pakkasalo yang telah memberikan hasil

yang memuaskan, namun demikian untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, pelaksanaan pembangunan di desa harus dapat memberikan hasil yang lebih besar lagi untuk perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat (Septiansyah & Setiawan, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh fakta tentang sumber daya, yaitu sumber daya manusia (pelaksana) program kurang pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan program. Pendidikan formal aparatur pelaksana juga rendah, sehingga sumber daya yang selama ini menjadi ujung tombak keberhasilan perencanaan pembangunan di desa tidak mampu mendorong tercapainya tujuan yang diharapkan dari perencanaan tersebut. Sehingga efektivitas pelaksanaan kegiatan dari dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

### **Pengawasan**

Kegiatan pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Di dalam pembangunan desa, kegiatan pengawasan tidak hanya

dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pemerintah desa, tetapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat desa selaku pelaksana pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa sudah cukup baik karena semua ikut andil, semua masyarakat mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut (Sari & Salahudin, 2021).

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif, hasil pengawasan dan pemantauan ini kemudian dapat menjadi dasar pembahasan dalam Musyawarah Desa (Musdes).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan dalam pembangunan dan juga pengelolaan keuangan dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD adalah aktor masyarakat politik yang

paling nyata serta dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dengan pemerintah Desa.

Melakukan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara cermat pada setiap proses serta tahapan yang sesuai dengan rencana pembangunan terhadap desa yang sudah ditentukan. Dengan begitu masyarakat mampu melakukan pengawasan sebagai bentuk peran aktif guna membantu Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.

Keberadaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan sebagai alat control bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintah dimana BPD merupakan sebagai perwakilan rakyat. Dengan demikian keberadaan BPD dalam pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan juga wewenangnya diharapkan mampu lebih optimal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala Desa (Sunarti, 2018).

Pada tahapan pengawasan tersebut, Desa Takkasalo sudah dianggap cukup bisa guna menjalankan pengawasan dengan baik. Sebab tidak hanya Tim Fasilitas dari Kabupaten, akan tetapi anggota BPD dan juga

masyarakat selalu aktif terlibat dalam pembangunan. BPD di Desa Pakkasalo, dalam menjalankan evaluasi terhadap pemerintah desa dengan cara membandingkan hasil pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Hal tersebut bisa dilihat terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang ada pada dusun I dan II di Desa Pakkasalo yang bangun pada tahun 2021. Pembangunan infrastruktur jalan di Dusun II, berupa pembangunan infrastruktur jalan beton dan pihak yang menjalankan pekerjaan jalan tersebut merupakan dari masyarakat dusun II.

Menurut ketua BPD pembangunan di Desa Pakkasalo sudah terbilang baik sebab tidak pernah ada masalah atau keluhan yang dilaporkan dari masyarakat, yang menjadi pelaksana proyek-proyek kegiatan pembangunan juga dari kelompok-kelompok atau lembaga masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah desa takkasalo telah melaksanakan proses perencanaan dalam rangka manajemen pembangunan desa lewat musrembang. Pelaksanaan dijalankan dalam proses pembangunan dengan melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki dari setiap pekerja pelaksana

pembangunan di Desa Pakkasalo. Proses pengawasan terhadap pembangunan telah berjalan cukup baik, meskipun dalam pengerjaan masih ada beberapa yang belum tersentuh namun terlepas dari semua itu pembangunan yang telah dijalankan oleh pihak pemerintah telah memberikan perubahan yang lebih baik. Hal tersebut juga terlihat dari partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai pada pengawasan dengan harapan memberikan akses maupun peran aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alexander. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri.
- Hurriyaturohman, Indupurnahayu, & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung, Wetan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 2021.
- Handoko, T. Hani. (2021). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan E- Musrembang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95115.
- Pardede, P. D. K., Tafonao, D. J., & Buulolo, E. E. (2021). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019-2020. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 78–89.
- Riyadi, S., & Bratakusumah, D. . (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, B. S., & Salahudin. (2021). Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa tentang Pelayanan Kesehatan sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. *Kybernan: Jurnal Studi Pembangunan*, 4(2), 240–248.
- Septiansyah, B., & Setiawan, A. (2021). Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, 5(1).
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 46–55.
- Wasistiono, S. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokusmedia.